

Kegiatan Evaluasi Usaha Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan SIKD PEMDA

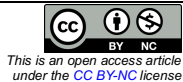
Mukhtar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Article Info

Article history:
Received: April 9, 2025
Revised: April 20, 2025
Accepted: April 31, 2025

Keywords:
Belanja Pemerintah;
Putus Sekolah;
Indeks Gini;
Akses TIK;
Kepemilikan Rumah;



ABSTRACT

Usaha Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan perlu diberi dukungan yang memadai dari lingkungan akademik, dukungan yang dilakukan mendorong kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pemerintah berdasarkan data dan instrumen yang tersedia secara publik. Kegiatan dilakukan dengan membandingkan data SIKD dengan data indikator kesejahteraan yang dipublikasikan pada portal terakit dengan metode statistik. Hasil kegiatan evaluasi menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat antara belanja pemerintah (terutama untuk barang/jasa dan subsidi) dan angka putus sekolah ($r = -0,98$, $p < 0,001$). Demikian pula, belanja untuk layanan publik dan infrastruktur TIK berkorelasi signifikan dengan peningkatan akses TIK ($r = 0,85-0,92$, $p < 0,001$). Namun, dampak terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) dan kepemilikan rumah kurang konsisten, yang mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih terarah dan inklusif. Kegiatan Evaluasi ini ini menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang efisien dan pendekatan holistik untuk memaksimalkan hasil kesejahteraan. Keterbatasannya meliputi ukuran sampel yang kecil dan disparitas pengeluaran regional. Kegiatan evaluasi dimasa mendatang harus memperluas cakupan data dan menggabungkan penilaian kebijakan kualitatif untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti empiris.

Corresponding Author:

Mukhtar
mukhtarstar@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hubungan Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) dengan Angka Putus Sekolah memiliki peran krusial dalam mengurangi angka putus sekolah melalui alokasi anggaran yang tepat. Bagaskara (2025) mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Jawa Barat, mencapai 658 ribu anak, disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya akses pendidikan. Di sektor pendidikan, belanja pemerintah melalui Dana BOS terbukti meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (Fahmi & Baradja, 2024). Namun, Wulansari & Khoirunurrofik (2021) menemukan hubungan nonlinear antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan, di mana efisiensi alokasi dana menjadi faktor penentu. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pendidikan, menciptakan gap dalam teori human capital investment.

Belanja pemerintah juga berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita, ketimpangan (Indeks Gini), kepemilikan rumah, dan akses teknologi informasi. Luthfia (2025) menjelaskan bahwa insentif

PPN-DTP sebesar Rp2 miliar untuk pembelian rumah mampu mengurangi beban finansial masyarakat kelas menengah, sehingga meningkatkan daya beli dan kepemilikan rumah. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan sektor properti yang berdampak pada peningkatan pengeluaran per kapita dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Mediana (2024) menyoroti alokasi anggaran TIK sebesar Rp7,7 triliun pada 2025 untuk pemerataan infrastruktur internet dan satelit Satria-1, yang bertujuan mengurangi kesenjangan digital. Namun, Ardhi Wardhana (dalam Mediana, 2024) mengkritik kurangnya fokus pada keamanan siber dan pusat data nasional, yang dapat menghambat pemerataan akses TIK. Dengan demikian, belanja pemerintah yang efektif dapat mengurangi ketimpangan (Indeks Gini) melalui peningkatan akses terhadap hunian dan teknologi, meski memerlukan pendekatan yang lebih holistik.

Ketimpangan pendapatan juga menjadi tantangan besar. Sherly et al. (2025) menemukan bahwa belanja fungsi pendidikan dan kesehatan mengurangi ketimpangan, tetapi peningkatan pendapatan per kapita justru memperlebar kesenjangan. Hal ini bertentangan dengan teori Kuznets, yang menyatakan bahwa ketimpangan akan menurun seiring pertumbuhan ekonomi. Gap ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik. Di bidang perumahan, relaksasi kebijakan kepemilikan rumah bagi WNA belum sepenuhnya efektif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (Setiabudhi, 2021). Sementara itu, Fourtiena (2021) menemukan bahwa program KPR-FLPP justru mengurangi penawaran rumah. Temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori kebutuhan dasar Maslow dan implementasi kebijakan perumahan.

Peran belanja pemerintah dalam pemerataan akses TIK juga belum optimal. Bangsawan et al. (2023) menemukan bahwa dampak belanja TIK terhadap pertumbuhan ekonomi lebih signifikan di Kawasan Timur Indonesia, sementara di Kawasan Barat dampaknya minimal. Gap ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah. Suhardoyo et al. (2022) mendapati bahwa adanya kesulitan dalam akses jaringan internet di wilayah desa, meskipun keinginan untuk penggunaan teknologi informasi sangat tinggi dan berpengaruh dalam usaha bisnis yang dijalani.

Berdasarkan Uraian diatas perlu dilakukan Kegiatan evaluasi yang bertujuan menganalisis hubungan antara variabel Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) dengan Gizi Balita, Angka Putus Sekolah, Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Status Kepemilikan Rumah Tinggal, dan Kepemilikan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGABDIAN

Sampel Kegiatan Evaluasi

Unit Analisis: Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia. Kriteria Sampel



- Memiliki laporan keuangan daerah (SIKD) yang diaudit dan dipublikasi di Portal DJPK Kemenkeu.
- Data indikator kesejahteraan tersedia di BPS dan sumber terkait.
- Teknik Sampling: Purposive sampling dengan pertimbangan kelengkapan data.

Lokasi/Objek Kegiatan Evaluasi

Lokasi: Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia.

Objek:

Variabel Independen Pos belanja APBD (Belanja Pegawai Langsung/Tidak Langsung, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial). Variabel Dependen: Indikator kesejahteraan (Angka Putus Sekolah, Pengeluaran per Kapita, Indeks Gini, Kepemilikan Rumah, Akses TIK).

Periode Kegiatan Evaluasi

Rentang Waktu: Data tahunan 2011–2024 (periode pasca reformasi akuntansi pemerintah).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Belanja Pegawai (bPg)	Belanja untuk gaji, tunjangan, dan manfaat pegawai (langsung/tidak langsung).	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja Modal (bmod)	Pengeluaran untuk aset tetap (infrastruktur, kesehatan, pendidikan).	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja Barang dan Jasa (Bbjs)	Alokasi untuk program bantuan tunai/nontunai (PKH, BST).	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja Bantuan Sosial (bbsos)	Alokasi untuk program bantuan sosial	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja Hibah (bhib)	Alokasi untuk program dana hibah	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja subsidi (bsu)	Alokasi untuk program dana subsidi	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Belanja Bantuan Keuangan (bbku)	Alokasi untuk memberikan bantuan keuangan	SIKD Kemenkeu](https://djpk.kemenkeu.go.id)
Akses TIK(akti)	Persentase rumah tangga dengan akses internet/kepemilikan smartphone	[BPS](https://www.bps.go.id) (indikator kesejahteraan).
Kepemilikan Rumah (rmil)	Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri	[BPS](https://www.bps.go.id) (indikator kesejahteraan).
Angka Putus Sekolah (apus)	Persentase angka putus sekolah SMA	[BPS](https://www.bps.go.id) (indikator kesejahteraan).
Pengeluaran per Kapita, Indeks Gini (ingin)	Persentase indeks gini	[BPS](https://www.bps.go.id) (indikator kesejahteraan).

Uji Statistik: Korelasi Spearman

- Data tidak berdistribusi normal.
- Skala pengukuran ordinal/interval.



HASIL DAN MANFAAT PROGRAM PENGABDIAN

Hasil Uji Statistik

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif			
	mean	min	max	s.dv
bPg	336143.2123	230209.81	384969.02	49554.499
bbjs	235393.9277	105936.36	359335.12	85850.891
bmod	182838.2269	108991	220847.44	35405.885
bsu	2797.257692	537.63	6737.71	2105.0992
bhib	64126.32417	17953.3	88688.79	18578.154
bbsos	10348.06667	7312.3	13281.7	2228.5254
bbku	87166.34692	21922.81	132928.34	44103.813
apusek	0.822307692	0.19	3.32	0.8286551
ingin	0.393461538	0.38	0.413	0.0120181
rmil	81.05153846	78.77	84.79	1.8484536
akti	57.24076923	26.21	86.54	22.482282

Statistik Deskriptif Belanja Pemerintah dan Angka Putus Sekolah

Rata-rata belanja pemerintah cukup tinggi, terutama belanja pegawai (mean = 336.143,21) dan belanja barang & jasa (mean = 235.393,93), sementara angka putus sekolah relatif rendah (mean = 0,82%). Variasi belanja (SD = 49.554,50–85.850,89) menunjukkan fluktuasi alokasi anggaran, sedangkan angka putus sekolah bervariasi dari 0,19% hingga 3,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah mungkin berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah, meskipun perlu analisis lebih lanjut untuk memastikan hubungan kausalnya.

Statistik Deskriptif Belanja Pemerintah dan Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini

Indeks Gini dan pengeluaran per kapita (mean = 0,393) relatif stabil (SD = 0,012), menunjukkan ketimpangan yang terkendali. Belanja hibah (mean = 64.126,32) dan bantuan sosial (mean = 10.348,07) mungkin berperan dalam redistribusi pendapatan, namun variasi belanja yang tinggi (SD = 18.578,15–22.228,53) menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa belanja pemerintah berpotensi memengaruhi kesenjangan, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi lebih mendalam.

Statistik Deskriptif Belanja Pemerintah dan Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Kepemilikan rumah cukup tinggi (mean = 81,05%) dengan variasi kecil (SD = 1,85), menunjukkan stabilitas akses perumahan. Belanja modal (mean = 182.838,23) dan subsidi (mean = 2.797,26)

mungkin berkontribusi pada peningkatan kepemilikan rumah melalui program perumahan atau bantuan pembiayaan. Namun, standar deviasi belanja yang tinggi ($SD = 35.405,89$) mengindikasikan ketidakmerataan alokasi, sehingga perlu kebijakan yang lebih terarah untuk dampak optimal.

Statistik Deskriptif Belanja Pemerintah dan Kepemilikan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepemilikan akses TIK bervariasi signifikan ($mean = 57,24\%$; $SD = 22,48$), mencerminkan kesenjangan digital. Belanja pegawai ($mean = 336.143,21$) dan barang & jasa ($mean = 235.393,93$) yang tinggi mungkin mendukung infrastruktur TIK, namun fluktuasi belanja ($SD = 49.554,50-85.850,89$) dapat memengaruhi konsistensi akses. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpotensi meningkatkan penetrasi TIK, tetapi diperlukan strategi yang lebih merata untuk mengurangi disparitas.

Matrix Korelasi Spearman

Tabel 3. Matriks Korelasi Spearman r-value

	r Value										
	bPgb	bjs	bmod	bsu	bhib	bbsos	bbku	apus	ingin	rmil	akti
bPg	1.00	0.81	0.32	0.81	0.69	-0.24	-0.26	-0.77	-0.56	0.39	0.85
bbjs	0.81	1.00	0.46	0.98	0.63	-0.19	-0.60	-0.98	-0.45	0.53	0.90
bmod	0.32	0.46	1.00	0.38	0.51	-0.05	-0.08	-0.39	0.09	0.25	0.34
bsu	0.81	0.98	0.38	1.00	0.59	-0.21	-0.61	-0.98	-0.45	0.55	0.92
bhib	0.69	0.63	0.51	0.59	1.00	-0.36	-0.32	-0.62	-0.44	0.03	0.68
bbsos	-0.24	-0.19	-0.05	-0.21	-0.36	1.00	0.60	0.18	0.49	0.51	-0.45
bbku	-0.26	-0.60	-0.08	-0.61	-0.32	0.60	1.00	0.64	0.45	0.10	-0.61
apus	-0.77	-0.98	-0.39	-0.98	-0.62	0.18	0.64	1.00	0.44	-0.53	-0.91
ingin	-0.56	-0.45	0.09	-0.45	-0.44	0.49	0.45	0.44	1.00	0.13	-0.46
rmil	0.39	0.53	0.25	0.55	0.03	0.51	0.10	-0.53	0.13	1.00	0.36
akti	0.85	0.90	0.34	0.92	0.68	-0.45	-0.61	-0.91	-0.46	0.36	1.00

n= 13

Tabel 4. Matriks Korelasi Spearman P-Value

	p Value										
	bPg	bbjs	bmod	bsu	bhib	bbsos	bbku	apus	ingin	rmil	akti
bPg		0.0008	0.2886	0.0008	0.0087	0.4371	0.3884	0.0022	0.0473	0.1876	0.0003
bbjs	0.0008		0.1124	0.0000	0.0220	0.5291	0.0293	0.0000	0.1192	0.0640	0.0000
bmod	0.2886	0.1124		0.1944	0.0743	0.8725	0.7887	0.1937	0.7749	0.4154	0.2629
bsu	0.0008	0.0000	0.1944		0.0325	0.4821	0.0284	0.0000	0.1218	0.0518	0.0000
bhib	0.0087	0.0220	0.0743	0.0325		0.2233	0.2835	0.0225	0.1296	0.9290	0.0112
bbsos	0.4371	0.5291	0.8725	0.4821	0.2233		0.0293	0.5589	0.0915	0.0780	0.1275
bbku	0.3884	0.0293	0.7887	0.0284	0.2835	0.0293		0.0194	0.1237	0.7407	0.0275
apus	0.0022	0.0000	0.1937	0.0000	0.0225	0.5589	0.0194		0.1344	0.0652	0.0000
ingin	0.0473	0.1192	0.7749	0.1218	0.1296	0.0915	0.1237	0.1344		0.6606	0.1142
rmil	0.1876	0.0640	0.4154	0.0518	0.9290	0.0780	0.7407	0.0652	0.6606		0.2233
akti	0.0003	0.0000	0.2629	0.0000	0.0112	0.1275	0.0275	0.0000	0.1142	0.2233	

Evaluasi Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) berhubungan dengan Angka Putus Sekolah

Hasil analisis menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara belanja barang dan jasa ($r = -0.98$, $p < 0.001$) serta belanja subsidi ($r = -0.98$, $p < 0.001$) dengan angka putus sekolah. Temuan ini sejalan dengan teori human capital investment, yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas sekolah (Arsandi, 2020). Hasil mendukung Mustaqimah et al (2017) bahwa belanja modal pemerintah dan pembangunan manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan. Namun, Wulansari & Khoirunrofik (2021) mengingatkan bahwa efisiensi alokasi dana menjadi kunci keberhasilan, sehingga peningkatan anggaran harus disertai dengan monitoring yang ketat.

Demikian juga belanja pegawai ($r = -0.77$, $p = 0.002$) berkorelasi negative. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak belanja pemerintah terhadap angka putus sekolah bergantung pada perlunya usaha dari personal aparat pemerintah jenis dan efektivitas program, seperti beasiswa atau bantuan operasional sekolah (Ahmad et al., 2022).

Evaluasi Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) berhubungan dengan Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini

Belanja pegawai ($r = -0.56$, $p = 0.047$) dan hibah ($r = -0.44$, $p = 0.130$) menunjukkan korelasi negatif dengan Indeks Gini, meskipun tidak semua signifikan. Temuan ini mendukung teori fiskal Musgrave bahwa belanja pemerintah dapat mendorong pemerataan (Fattah, 2022), namun ketidakkonsistenan ($SD = 18.578, 15-22.228, 53$) menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Sherly et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan pendapatan per kapita justru memperlebar kesenjangan, bertentangan dengan hipotesis Kuznets. Hal ini mengisyaratkan bahwa belanja sosial dan kesehatan lebih efektif mengurangi ketimpangan dibandingkan kebijakan pertumbuhan ekonomi konvensional, sehingga perlu realokasi anggaran berbasis dampak.

Hasil uji statistik tidak mendukung Mustaqimah et al (2017); Rustariyuni (2014); Subagia & utama, (2022); yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah dan pembangunan manusia memiliki dampak yang positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dan Nina & Surya, (2018) yang menemukan rasio gini dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Evaluasi Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) berhubungan dengan Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Belanja barang dan jasa ($r = 0.53$, $p = 0.064$) dan subsidi ($r = 0.55$, $p = 0.052$) menunjukkan tren positif dengan kepemilikan rumah, meskipun tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori kebutuhan dasar Maslow bahwa perumahan adalah kebutuhan fisiologis utama (Titania, 2023). Namun, program seperti KPR-FLPP dinilai kurang inklusif (Fourtiena, 2021), sehingga perlu penyesuaian kebijakan.

Tingginya kepemilikan rumah (mean = 81,05%) dengan variasi kecil (SD = 1,85) menunjukkan stabilitas, tetapi ketidakmerataan alokasi belanja modal (SD = 35.405,89) menghambat dampak optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas sasaran program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Evaluasi Peran Pemerintah (Belanja Pemerintah) berhubungan dengan Kepemilikan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Belanja pegawai ($r = 0.85$, $p < 0.001$), barang dan jasa ($r = 0.90$, $p < 0.001$), dan subsidi ($r = 0.92$, $p < 0.001$) berkorelasi sangat kuat dengan akses TIK. Temuan ini mendukung teori pertumbuhan Solow bahwa infrastruktur TIK meningkatkan produktivitas (Bangsawan et al., 2023; Wirianto 2016). Namun, kesenjangan digital (SD = 22,48) mencerminkan disparitas pemanfaatan teknologi.

Kritik Ardhi Wardhana (dalam Mediana, 2024) terhadap kurangnya fokus keamanan siber mengindikasikan bahwa alokasi anggaran TIK (Rp7,7 triliun) perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan pusat data nasional untuk memaksimalkan dampak ekonomi.

Keterbatasan dan Saran Evaluasi

Keterbatasan Kegiatan Evaluasi meliputi ukuran observasi sampel kecil ($n=13$) dan ketidakkonsistenan alokasi belanja antar wilayah. Saran untuk Kegiatan Evaluasi mengintegrasikan variabel kualitatif (misalnya kualitas kebijakan), dan mengevaluasi dampak jangka panjang belanja pemerintah berbasis wilayah (Bangsawan et al., 2023).

EVALUASI DAN MONITORING

Belanja pemerintah terbukti signifikan mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses TIK, tetapi dampaknya terhadap ketimpangan dan kepemilikan rumah masih terbatas. Efektivitas kebijakan bergantung pada efisiensi alokasi, desain program inklusif, dan pendekatan holistik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat monitoring anggaran dan kebijakan berbasis bukti empiris untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Andi, G. K., & Andi, M. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5–Nomor 2(Juli 2012). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1358>
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1358/pdf>
- Arsandi, S. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/: Case Study Year 2010-2012. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 95–120. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/525>
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/525>
- Bangsawan. Nuryartono, Nunung., Pasaribu, Syamsul Hidayat. (2023) Dampak Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Barat Dan Timur Indonesia P- ISSN : 1979-5149 E-ISSN: 2686-2514 *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Desember, 12(2): 146-158 <https://doi.org/10.29244/jekp.12.2.2023.146-158> Available Online: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/index>
- Bagaskara. Bima (2025, May 23). 658 Ribu Anak Putus Sekolah, Fraksi PPP Minta Dedi Mulyadi Turun Tangan. *Detikjabar*; detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7928390/658-ribu-anak-putus-sekolah-fraksi-ppp-minta-dedi-mulyadi-turun-tangan>
- Fahmi, A., & Baradja, N. L. (2024). Analisa Dampak Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Anggaran Dana Tunjangan Profesi Guru Terhadap Angka Harapan Lama Sekolah. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 953–964. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19405>
<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/19405/11107>
- Fattah, Sanusi., Fadillah, A Nur., Suhab, Sultan (2022) Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*. Vol. 1 No.1 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jeds/article/view/20607>
- Fourtiena, Elenka and Wisana, I Dewa Gede Karma (2021) "Subsidi Perumahan, Migrasi dan Permintaan Rumah Studi Kasus Program Kpr Bersubsidi di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 16: Iss. 2, Article 7. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/7>
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=jke>
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/21/pejuang-pasar-diproyeksikan-besar-pemerintah-masih-fokus-atasi-ketimpangan-infrastruktur-tik>



- Luthfia, A. (2025, April 8). Pahami PPN Ditanggung Pemerintah agar bisa beli rumah lebih murah. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4756717/pahami-ppn-ditanggung-pemerintah-agar-bisa-beli-rumah-lebih-murahgoogle_vignette
- Mediana (2024, August 21). Politik anggaran pembangunan teknologi informasi komunikasi 2025. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/21/pejuang-pasar-diproyeksikan-besar-pemerintah-masih-fokus-atasi-ketimpangan-infrastruktur-tik>
- Mustaqimah, Khodijah., Hartoyo, Sri., Fahmi, Idqan (2017) Peran Belanja Modal dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 6 No. 2 <https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.2017.1-15> <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22391> <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/22391/14864>
- Nina, G. A., & Surya Dewi Rustariyuni. (2018). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali.. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 18(2), 129–150. <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i2.23330> <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/23330>
- Nugroho, Ari Cahyo (2014) Masyarakat Desa, Internet dan Peningkatan Ekonomi (Survai Komunitas PNPM di Jambi, Bengkulu, Babel). Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 18 No. 2 Hal : 151 - 168 <https://media.neliti.com/media/publications/133106-ID-masyarakat-desa-internet-dan-peningkatan.pdf>
- Rustariyuni, Surya Dewi (2014). Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan per Kapita, Belanja Daerah dan Laju PErumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kaupaten/Kota di Profvnsi Bali periode 2004-2012.PIRAMIDA, [S.I.], v. 10, n. 1, july. ISSN 2685-788X. Available at: <https://jurnal.harianregional.com/piramida/id-15954>
- Setiabudhi, M. (2021). Implementasi Peraturan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing (Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). SUPREMASI : Jurnal Hukum, 6(2), 164–177. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1882> <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/1882>
- Sherly, Senja Rindiani., Fadhlurrahman, Ruslan., Syofriza, Sofyan (2025) Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan di Indonesia Jurnal Ekonomi Trisaktie-ISSN2339-0840<https://www.ejournal.trisakti.ac.id/index.php/jetVol.5.No.1.April.2025:hal:33-44> <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v5i1.21552> <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/21552/12259>



- Subagia, I Gusti Ngurah Kadek Agus., utama, Made Suyana. (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM di Kabupaten /Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, [S.l.], p. 1538-15248, dec.. ISSN 2337-3067. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/85859>>. doi: <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i12.p10>.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/85859>
- Suhardoyo., Cahyadi, Cepi., Triantori, Vito. (2022). Membangun Internet Desa dan Sosialisasi Penggunaan Media Sosial dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. Jurnal Pengabdian Dharma Wacana. 3. 81-91. 10.37295/jpdw.v3i1.266. https://www.researchgate.net/publication/366982344_Membangun_Internet_Des_dan_Sosialisasi_Penggunaan_Media_Sosial_dalam_Mendukung_Peningkatan_Ekonomi_Masyarakat_Desa/citation/download
- Titania, Ramadhanti., Sultan, Suhab., Retno, Fitrianti, (2023) Penentu Backlog Perumahan Tingkat Daerah Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial 2(1): 17-40 e-ISSN: 2829-2324 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jeds/article/view/24317>
- Wirianto Pradono (2016) Dampak Sosial Ekonomi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Perkembangan Teknologi Pitalabar di Indonesiauletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 16 No.2 (2016): 131-146. <https://bpostel.kominfo.go.id/index.php/bpostel/article/view/178/229>
- Wulansari, Narulita Ratih and Khoirunurrofik, Khoirunurrofik (2021) "Apakah Belanja Pendidikan dan Kualitas Guru dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan?," Jurnal Kebijakan Ekonomi: Vol. 16: Iss. 2, Article 10. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/10>
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1106&context=jke>